

DUA PILAR KEHIDUPAN KEBANGSAAN DALAM KOMPETISI GLOBAL

ABDUL MUNIR MULKHAN

Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Anggota Komnas HAM RI

Fakta sosial menunjuk keberadaan elit dalam kehidupan bersama dimana gagasan-gagasan besar lebih sering lahir dari kelompok elit tersebut. Hampir mustahil dalam kehidupan suatu komunitas tanpa kehadiran lapisan elit, segelintir orang pemroduk gagasan dan penggerak dinamika publik. Lapisan elit itu seringkali dibedakan dalam dua simbol yang lebih dikenal sebagai ulama dan umara. Posisi keduanya berubah dan berkembang searah mobilitas sosial warga komunitas selain dipengaruhi oleh bakat bawaan masing-masing.

Kelompok elit selalu membutuhkan legitimasi dukungan dari kelompok yang sering disebut sebagai rakyat lebih khusus lagi *wong cilik*. Dalam hubungan ini, para pemikir Islam klasik, seperti Imam Al-Ghozali dan juga Ibn Rusd, membagi masyarakat ke dalam dua kelompok yang pertama disebut kelompok *khos*, yakni sekelompok kecil orang yang cenderung menjadi panutan publik atau umat. Kelompok kedua disebut kelompok *'aam* atau umat sebagai mayoritas anggota dalam suatu komunitas kehidupan bersama.

Dalam pemikiran dan tradisi Islam kelompok pertama itu bisa terdiri dari apa yang selama ini kita kenal sebagai ulama (kiai, pemimpin gerakan Islam, khatib, dai atau muballigh; yang lebih berkaitan dengan moral, akhlak, dan hal-hal yang bersifat spiritual) dan persoalan-persoalan surgawi. Sementara yang lain sering lebih dikenal sebagai umara (pemimpin kegiatan-kegiatan yang lebih bersifat duniawi atau sekuler) yang tampil sebagai birokrat dalam sistem pemerintahan modern yang lebih menguasai persoalan sekuler dan duniawi.

Dalam perkembangan politik nasional, hubungan dua pilar kehidupan kebangsaan tersebut sampai pada satu titik yang boleh disebut sebagai “ketegangan” ketika terjadi kebuntuan komunikasi dan semacam *distrust* di antara keduanya. Hal itu ditunjukkan ketika beberapa waktu lalu beberapa tokoh agama negeri ini menyatakan tentang kebohongan publik yang dilakukan oleh elit pemerintahan. “Badan Pekerja Gerakan Tokoh Agama menilai, delapan poin janji Presiden SBY tidak atau belum direalisasikan. Persoalan yang dilontarkan perwakilan Badan Pekerja Tokoh Lintas Agama itu masih berkaitan dengan tema besar yang mereka sebut “18 Kebohongan Pemerintahan Presiden SBY”. Terdiri dari “9 Kebohongan Lama dan 9 Kebohongan Baru”. (Gatra, No. 11 Tahun XVII, 26 Januari 2011 hlm 16-19)

Fakta ideal yang bisa dibaca dalam sejarah kebangsaan bangsa-bangsa di dunia atau juga dalam sejarah kebangsaan negeri ini bisa menjadi pelajaran berharga ketika kedua pilar kebangsaan itu menjalankan fungsi dan peran masing-masing. Negara mestinya memberi ruang bagi kehadiran ulama atau yang lebih luas lagi kehadiran tokoh dan pemimpin agama secara lebih terlembaga sebagai bagian dari eksistensi dan dinamika kehidupan negara. Dalam sejarah kebangsaan bangsa-bangsa modern situasi politik-kekuasaan di atas mendorong lahirnya teologi pembebasan setelah jauh sebelumnya memunculkan model profetis (kenabian) elit keagamaan yang lebih kritis pada pusat kekuasaan politik tapi lebih memihak rakyat kebanyakan dan kaum marginal. Fenomena demikian mengandaikan keniscayaan fungsi dan peran elit keagamaan profetis yang humanis sebagai terjemah dari fungsi kenabian para nabi (anbiya) yang lebih mendahulukan kepentingan kemanusiaan. Kita bisa membaca peran dan fungsi ideal ulama dan pemimpin keagamaan yang lebih memihak kemanusiaan kaum marginal daripada dukungan terhadap penguasa politik.

Ketika fungsi kenabian tersebut gagal dipenuhi, maka kehancuran kekuasaan dan kehidupan kebangsaan hanyalah soal waktu sebagaimana juga bisa dibaca dari sejarah kekuasaan Islam saat penguasa melupakan fungsi profetiknya. Sementara ulama melupakan fungsi kritis dan pemihakan pada kaum marginal.

Soalnya ialah apakah para pemimpin agama dan atau ulama memilih jalan profetis dalam memainkan peran kritisnya yang karenanya bisa berakibat tidak memperoleh fasilitas ekonomi atau tergiur glamor kekuasaan politik dengan limpahan ekonomi dan harta benda? Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan nasib kaum marginal dan rakyat kebanyakan selain posisi gerakan keagamaan dalam percaturan kekuasaan politik. Namun lebih penting lagi ialah kehendak penguasa politik (umara) untuk secara sadar menempatkan fungsi kritis ulama sebagai bagian dari pemenuhan fungsi kekuasaan yang dimilikinya. Karena itu diperlukan kehadiran apa yang sering disebut sebagai sang negarawan, yang lebih mendahulukan kepentingan kemanusiaan universal yang berguna untuk mengangkat harkat dan martabat warga bangsa dalam dinamika dan kompetisi global kehidupan kebangsaan negeri ini di tengah persaingan bangsa-bangsa di dunia yang semakin sengit*